



Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030

Fajar Puja Pangestu, Nadia Shelvia Rahmadiani, Nike Tanzila Hardiyanti, Ermita Yusida⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

E-mail : fajar.puja.1804326@students.um.ac.id

A B S T R A C T

The Sustainable Development Goals (SDGs) are global action plans agreed by world leaders, including Indonesia. To eliminate poverty, reduce inequality and protect the environment. For Indonesia, the goal of sustainable development is to make Indonesia a developed country, able to develop in all aspects, and be able to properly and comprehensively apply and implement the concept of a sustainable economy, so that Indonesia can become a fully developed country. The research method used in this scientific article is the literature study method. Literature review is a scientific study that focuses on a particular topic to identify a theory or method, develop the theory or method, and summarize its development. The goals of the SDGs are global values and are basically the roots of the values of Pancasila. Adherence to the principles of the sustainable development goals of the Pancasila economic system illustrates this. The Pancasila economic system or people's economy is guided by the values of Pancasila. It is in accordance with the 1945 Constitution and Pancasila. In order for the plan for the Sustainable Development Goals to be successful, the role of the government must prioritize current policies and improve social justice and human rights, of course, must be guided by the values of Pancasila and the 1945 Constitution to realize the Indonesian nation.

Keywords: Pancasila, Sustainable Economy, SDGs

A B S T R A K

Sustainable Development Goals (SDG) adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Untuk menghilangkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan melindungi lingkungan. Bagi Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat menjadikan Indonesia negara yang maju, dapat berkembang dalam segala aspek, serta dapat menerapkan dan menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan dengan baik dan menyeluruh, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang sepenuhnya maju. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode studi pustaka. Tinjauan pustaka adalah studi ilmiah yang berfokus pada topik tertentu untuk mengidentifikasi suatu teori atau metode, mengembangkan teori atau metode tersebut, dan merangkum perkembangannya. Tujuan SDGs adalah nilai-nilai global dan pada dasarnya merupakan akar dari nilai-nilai Pancasila. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dari sistem ekonomi Pancasila menggambarkan hal ini. Sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Itu sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Agar rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat berhasil, peran pemerintah harus mengedepankan kebijakan yang ada saat ini serta meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, tentunya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Ekonomi Berkelanjutan, SDGs

PENDAHULUAN

SDGs merupakan suatu sistem yang telah direncanakan dan juga memiliki komitmen oleh para pemimpin bangsa, dimana termasuk pemimpin Indonesia. SDGs ini dilaksanakan secara global dan makro. adapun tujuan dari SDGs yakni untuk menumpas kemiskinan, meminimalisir ketimpangan, serta menjaga lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki potensi untuk mengubah Indonesia menjadi negara berkembang yang dapat berkembang di segala bidang dan dapat menerapkan serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan secara tepat. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan telah disahkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015. Sekitar 193 pemimpin nasional, termasuk Indonesia, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Indonesia saat itu diwakili oleh Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla. Tujuan SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 tujuan, yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Agenda PBB mengesahkan SDGs ini memang suatu keputusan yang positif.



Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: www.globalgoals.org

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang mampu berkembang di segala aspek dan juga mampu melaksanakan dan menerapkan konsep ekonomi keberlanjutannya secara baik dan menyeluruh sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju yang seutuhnya. Target pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik merupakan pilar SDGs yang terakhir. SDGs yang telah disusun tersebut sangat memperhatikan aspek keterkaitan antar tujuan. Oleh itu berbeda dengan MDGs yang kurang memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, usaha untuk meraih sebuah tujuan memiliki hubungan yang erat dengan usaha untuk meraih tujuan yang lainnya.

Baik Pancasila maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan didasarkan pada semangat moral dan nilai-nilai dasar yang saling menguatkan. Pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB tahun 1960 membawa Pancasila ke dunia yang seharusnya mengharumkan nama bangsa Indonesia atas peradabannya. Bangsa Indonesia memiliki mukjizat nonmateri berupa Pancasila yang ternyata lebih penting dari pada materil. Pengaruh Pancasila secara efektif mempersatukan rakyat Indonesia secara damai. Ikatan antar negara persaudaraan dan sebangsa merupakan salah satu nilai inti Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pertama, perintah Tuhan Yang Maha Esa, relevansi nilai-nilai sakral dalam



kemajuan dan kelangsungan suatu negara. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah bahwa peradaban yang sudah ada sejak lama adalah peradaban yang hatinya masih diselimuti ketuhanan atau spiritualitas. Betapapun kuatnya peradaban muncul di permukaan, jika tidak ada visi spiritual di dalam hatinya, maka peradaban tersebut berada di ambang kehancuran.

Lima prinsip Pancasila memiliki nilai yang tumpang tindih dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan fokus pada tiga tema: ekonomi, masyarakat, dan biosfer. Tujuan yang sama adalah untuk mempertahankan kehidupan sosial dan melayani kemanusiaan, budaya dan Berjuang untuk keadilan. Baik Pancasila maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah hubungan persaudaraan dengan implikasi lokal dan global atau internasional mengembangkan konsep kewarganegaraan global dengan harapan menanamkan dalam diri setiap orang kesadaran kosmopolitan, yaitu pemahaman tentang cita-cita humanis bahwa semua manusia adalah sama, terlepas dari perbedaan fisik, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan, atau faktor lainnya. Serta dalam artikel ini, memfokuskan pembahasan mengenai hubungan Ekonomi Pancasila dengan SDGs berfokus pada ranah ekonomi, yakni sesuai dengan poin 7, 8, 9, 10, serta 17 seperti yang sudah terlihat pada tujuan dari SDGs.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur review. Tinjauan pustaka adalah studi ilmiah tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka akan menguraikan perkembangan topik tertentu. Tinjauan pustaka akan memungkinkan peneliti untuk menentukan teori atau metode, mengembangkan teori atau metode, dan menentukan gap antara teori dan bidang atau hasil penelitian terkait (Rowley & Slack, 2004; Saltikov & Josette, 2012). Melakukan literatur review sama artinya dengan melakukan kegiatan: 1) pengumpulan data/informasi, 2) melakukan evaluasi data, teori, informasi atau hasil penelitian, serta 3) menganalisa hasil publikasi seperti buku, artikel penelitian atau yang lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk menganalisis bahwa nilai pancasila sebagai Pedoman dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs. Dalam penulisan artikel ilmiah ini penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder, dimana semua data-data diambil dari buku, artikel, jurnal, berita maupun media elektronik lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030

Tujuan dan prioritas terkait dengan aspek alam, sosial dan ekonomi dari pertumbuhan berkelanjutan. Tujuan SDGs memiliki lima konsep utama untuk mencapai tiga poin utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu kewarganegaraan, bumi, kemakmuran, keharmonisan, dan kemitraan untuk mencapai tiga tujuan luhur pada tahun 2030, yaitu pengentasan kemiskinan, pencapaian kesetaraan, dan mitigasi perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tujuan global telah ditetapkan.

Prinsip utama dari SDGs adalah tidak boleh ada yang tertinggal, dan untuk itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dapat menjawab dua pertanyaan: keadilan prosedural, atau sejauh mana semua pihak, terutama yang tertinggal, harus berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan; keadilan substantif, atau kebijakan dan rencana dapat tercapai atau mampu menjawab pertanyaan. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut mencakup pelaksanaan dan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui partisipasi semua pihak. Ketujuh belas target tersebut diputuskan oleh 193 negara, termasuk Indonesia, pada



Agustus 2015. 169 tujuan yang dipecah menjadi tujuh belas prioritas dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan di semua negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang.

Faktanya, Kelompok Koordinasi Nasional SDG akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan bagaimana memasukkan SDGs ke dalam rencana nasional mereka. Tanpa tim kerja tim, implementasi SDG tidak akan menjadi pilihan terbaik. Konsultan senior Infid Michael Bobby Hoelman mengatakan bahwa dari perspektif Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN), peringkat Indonesia turun dari 98 pada 2016 menjadi 100 dari 157 negara pada 2017 (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, & Fuller, 2019). Terkait publisitas di Indonesia, media di Indonesia menghabiskan waktu delapan bulan untuk mendidik publik tentang pemberitaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena kecepatan penyebaran informasi di media Indonesia sangat lambat, masyarakat sulit untuk mengetahuinya dan oleh karena itu dapat mempertanyakan tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Menurut Kelompok Bank Dunia mengatakan bahwa tantangan besar yang dihadapi Indonesia yakni dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Hal ini berkaitan karena pemerintah daerah kurang optimal dan masih minim perihal kapasitas teknis dan kelembagaan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama mengenai kendala keuangan negara. Disisi lain, pemerintah telah bekerja sama dengan Kelompok Bank Dunia untuk mengembangkan rencana nasional dalam memperbaiki kondisi daerah kumuh, yang ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal untuk 2 juta orang Indonesia. Hal ini nantinya memungkinkan masyarakat untuk menggunakan infrastruktur, fasilitas perkotaan serta proyek perumahan yang terjangkau. Tak lupa juga dalam penggunaan sumber daya publik dan swasta (Mohieldin & Vasquez, 2017). Selain itu, pemerintah juga membuat program terkait SDG lainnya termasuk penyediaan air perkotaan, sanitasi, dan pengelolaan limbah padat, dimana semuanya perlu dilakukan untuk mencapai SDG di Indonesia. Geopark atau SDGs telah digunakan oleh pemerintah untuk mencapai SDGs terkait lingkungan. Istilah "taman bumi" berarti "konservasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal", yang keduanya merupakan indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia adalah rumah bagi empat dari 140 geopark yang termasuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dapat digunakan untuk memobilisasi dan mengkoordinasikan peran mitra pemerintah, terutama melalui pengembangan fasilitas proyek, pengurangan risiko, pembiayaan dan investasi untuk memperoleh dana proyek untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Berdasarkan studi Sustainable Development Goals 2019, Indonesia menempati peringkat 102 di antara 162 negara dalam hal implementasi Sustainable Development Goals. Indonesia telah berhasil mempertahankan dan meningkatkan tiga dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang layak, serta mitigasi perubahan iklim. Dengan mencapai delapan sasaran, sementara enam lainnya tetap sama atau semakin parah. Tidak ada data tentang dua aspek untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai konsumsi dan keluaran yang bertanggung jawab. Menurut pemerinkatan global, Indonesia memiliki skor rata-rata 64,2 lebih tinggi.

Berawal dari 54,4 poin pada 2016, indeks naik menjadi 64,2 poin hanya dalam waktu tiga tahun (SDG). Sejak pemerintah daerah melaksanakan keputusan pemerintah pusat, efektivitas pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan bergantung pada pemerintah daerah. Adanya partisipasi politik yang tinggi di daerah, dan birokrasi di tingkat daerah untuk mencapai transformasi dan penyelenggaraan tujuan pembangunan berkelanjutan Akhirnya, keberadaan organisasi masyarakat sipil yang kuat telah



berkontribusi pada keberhasilan realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Tak lupa, sasaran pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kemiskinan, ketimpangan dan lingkungan di Indonesia harus didukung dengan rencana sosialisasi agar sasaran pembangunan tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Konsep Ekonomi Pancasila

Ekonomi sistem Pancasila baru diterapkan setelah Perang Dunia II. Namun, menurut Profesor Rudiger Funk, gagasan ini sebenarnya dikembangkan sebelum atau sesudah Perang Dunia Pertama, yakni pada tahun 1930-an. Ketika sistem ekonomi Pancasila diterapkan, negara tidak memiliki sistem formal dan tertutup. Di Indonesia setelah kemerdekaan tidak pernah disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, akan tetapi UUD 1945 memuat ketentuan yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Ketentuan tersebut pada dasarnya tertulis dalam Pasal 33 dan Pasal 23 (Tentang Hak Anggaran). Aspek lain yang bersifat politik negara. Pasal 27 ayat 1 (tentang kesempatan kerja dan taraf hidup) dan Pasal 34 tentang jaminan sosial bagi orang miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi DPR dan anggota yang bersifat sosial.

Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah dengan menghidupkan kembali jiwa Pancasila. Pancasila adalah inti dari kelangsungan hidup negara ini. Pancasila tidak hanya menjadi landasan negara, ideologi dan filosofi, tetapi juga perwujudan dari prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Agar setiap negara Indonesia dapat menginspirasi nilai-nilai Pancasila, pemerintah perlu menyusun rencana revitalisasi Pancasila. Pendiri Indonesia percaya bahwa Pancasila dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, ketimpangan sosial dan korupsi, yang juga dapat menjadi dasar kerjasama penuh dengan negara lain (Agusalim, Karim, & Saefuddin, 2014).

Konsep dasar ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk melakukan aktivitas dunia, sehingga terwujud kesejahteraan, keamanan dan kesejahteraan hidup serta meyakini bahwa ilmu ekonomi tentang upaya manusia untuk mencapai kemakmuran. Mengenai sistem ekonomi Pancasila termasuk didalamnya nilai Pancasila yang merupakan lambang negara yang berbeda dengan kapitalisme atau sistem sosialis. Dan pemerintah atau negara yang mandiri diperlukan untuk membentuk kerangka regulasi ekonomi dan tujuan Pancasila (terutama tujuan yang berkaitan dengan strategi pembangunan). Dan pemerintah atau negara yang kuat dan mandiri diperlukan untuk membentuk kerangka regulasi permainan ekonomi dan tujuan Pancasila (terutama tujuan yang berkaitan dengan strategi pembangunan).

Ideologi Pancasila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem perekonomian tidak terlepas dari keadilan dan kemakmuran bersama atau asas kekeluargaan. Ideologi Pancasila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem perekonomian mengutamakan keadilan dan kemakmuran berdasarkan asas kekeluargaan. Ilmu ekonomi Pancasila memberikan berbagai konsep, gagasan dan prinsip untuk perbaikan sistem perekonomian Indonesia. Peran konstitusional kebebasan dalam pembangunan sangat erat kaitannya dengan pentingnya kemandirian yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai bentuk kontrak sosial, secara sempurna terwujud (melebihi ekspektasi) dalam komposisi dan peran instrumentalnya. Keduanya adalah ideologi yang harus masuk ke dalam platform kebijakan nasional, dan keduanya merupakan norma masyarakat dan kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kehidupan bernegara. Menurut Bung Karno, sebuah negara tidak didasarkan pada ras, ras, atau bahasa yang sama, tetapi



atas keinginan untuk hidup bersama. Dengan kata lain, setiap orang adalah agen kebahagiaan orang lain.

Hubungan Ekonomi Pancasila Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030

Secara filosofis, tujuan pembangunan nasional Indonesia dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi darah segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan perdamaian berdasarkan dunia Tatanan dunia hukum. Kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian, pembangunan itu sendiri pada dasarnya merupakan proses multi dimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar pada semua sosial politik, ekonomi, infrastruktur, dan sistem lainnya untuk memperbaiki segala aspek kehidupan. Pembangunan negara mencerminkan pendekatan Pancasila, khususnya sila kelima yaitu “keadilan sosial untuk semua”, yaitu upaya memajukan pembangunan dan hasil yang dicapai untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ini terkait dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana perekonomian nasional merupakan salah satu dimensi dalam SDGs disamping dimensi sosial dan lingkungan (Alisjahbana et al., 2018).

Berbicara tentang SDGs, dalam beberapa tahun terakhir ini istilah pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi salah satu isu pembangunan yang banyak menarik perhatian banyak kalangan. Menurut (Rahman, 2012) menyatakan bahwa SDGs Indonesia menerapkan pola pembangunan dengan prinsip *No One Will Be Left Behind*, artinya pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat bagi semua. Pembangunan tidak boleh terkonsentrasi pada satu kawasan atau satu kawasan, tetapi harus tersebar luas dan menysar setiap daerah. Baik dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, hingga struktur terkecil yaitu pedesaan. Selain itu, pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada satu peran dan fungsi pemerintah, tetapi juga harus melibatkan semua pihak secara kolektif. Serta ormas (Organisasi Masyarakat), filantropis, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Semua pihak ini terlibat aktif. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perkembangan SDGs ke depan. Hal itu dilakukan dalam rangka menanamkan prinsip ekuitas. Jika dicermati, hubungan ekonomi antara Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memang sangat erat dan saling mendukung. Hal ini dapat dilihat dari peran konstitutif dan instrumental Pancasila sebagai bentuk kontrak sosial dan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercermin secara sempurna (melebihi ekspektasi). Keduanya adalah ideologi yang harus ditempatkan dalam platform kebijakan nasional, dan menjadi norma masyarakat dan kehidupan berbangsa yang mewujudkan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan didasarkan pada pertimbangan tersebut.

Jika direfleksikan dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia jauh sebelum bergabung dengan SDG 2015, maka Indonesia sudah memiliki standar yang lengkap yaitu Pancasila. Pancasila bukanlah nilai yang terlihat seperti itu, melainkan sebuah persamaan yang diambil dari jiwa bangsa Indonesia. Baik Pancasila maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) didasarkan pada semangat moral, nilai-nilai universal dan saling melengkapi. Bangsa Indonesia menikmati keajaiban dunia nonmateri berupa Pancasila Fakta membuktikan bahwa Pancasila lebih unggul daripada materi. Kekuatan Pancasila telah berhasil mempersatukan bangsa Indonesia secara damai. Berkaitan dengan sistem perekonomian, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang fokus pada ekonomi berkeadilan yang dapat menjadi



pedoman dalam pelaksanaan SDG's di Indonesia, dalam berbagai bidang. Menurut (Mubyarto, 1987), Ekonomi Pancasila merupakan sistem perkonomian yang di berkaitan atau sesuai dengan ideologi Pancasila, dimana sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Munculnya atau lahirnya sistem ekonomi Pancasila berasal dari induk, yakni Pancasila dan juga UUD 1945, dimana pada Pancasila bersumber pada sila ke 5, sedangkan dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34 (Limbong, 2011). Saat ini umur ekonomi Pancasila sudah setua negara Indonesia, hal ini karena Ekonomi Pancasila terbentuk saat Indonesia sudah berdaulat sebagai bangsa sendiri.

Dengan adanya eksistensi ekonomi Pancasila, dimana Ekonomi Pancasila berpedoman dari Pancasila sebagai landasan idealnya serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, maka memang sangat beralasan jika Ekonomi Pancasila dijadikan pedoman dalam tujuan pembangunan maupun pelaksanaan SDG's di Indonesia, umumnya dari semua bidang, dan khususnya dari bidang ekonomi. Penjelasan selanjutnya dijelaskan melalui tap MPR/S (GBHN), UU dan Peraturan Pemerintah. Adapun GBHN merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagai contoh isi GBHN yang *sinkron* antara Ekonomi Pancasila dan juga pembangunan pembangunan sektor lain yakni seperti dalam GBHN 1973 – 1998. **Pertama**, secara keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan yang secara harmonis menyatu sebagai pengamalan seluruh sila Pancasila, termasuk mengamalkan seluruh sila Pancasila. **Kedua**, melaksanakan pembangunan nasional secara terencana, menyeluruh, menyeluruh, tepat sasaran, bertahap, dan berkesinambungan, guna mendorong peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan dan pemerataan kehidupan dengan negara maju lainnya. **Ketiga**, implementasi tujuan pembangunan jangka panjang kedua adalah mengikuti trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk memacu dan memacu perkembangan bidang-bidang lain, dan pembangunan menjadi kekuatan utama untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan hasilnya, yaitu memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan memberi mereka semangat kekeluargaan. dan membantu mereka memberikan dukungan. Melalui stabilitas negara yang stabil, dan melalui pembangunan berkelanjutan untuk mencapai perubahan dinamis, dan memperhatikan fungsi perlindungan lingkungan. **Keempat**, pembangunan badan usaha nasional yang terdiri dari koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha swasta diorientasikan untuk berkembang dan berkembang sebagai usaha patungan berdasarkan asas kekeluargaan, dalam mekanisme pasar terkelola yang ditanamkan, digerakkan, dan dikendalikan dalam perekonomian Pancasila. Sistem. Adapun tataran hukumnya antara lain UU No. 6/74 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan, UU No. 4/28 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berlandaskan Kesejahteraan Rakyat, UU No. 3/89, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesejahteraan Negara dan Kesejahteraan Rakyat Telekomunikasi Sejahtera, UU No. 3 tentang Pangan No. 7/96 UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 38/2004, Memperlakukan Pembangunan Jalan Sebagai Tanggung Jawab Negara, UU No. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Yang Dimiliki Negara untuk Rakyat dan Lain-lain.

Melalui hubungan di atas, terlihat jelas bahwa ekonomi Pancasila terkait dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena secara fundamental ekonomi Indonesia yang bertumpu pada ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, menurut UUD 1945 dan Pancasila dapat memenuhi kebutuhan dasar umat manusia dan mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, dan



kesejahteraan. Dan jangan lupakan persamaan dan keadilan. Mengenai latar belakang perekonomian nasional, UUD 1945 juga memberikan jaminan pada Pasal 33 (4) yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan menurut demokrasi ekonomi, dengan persatuan, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Prinsip seksualitas. Dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan penyatuan ekonomi nasional”. Mengenai ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, konsekuensi logis dari pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah merumuskan berbagai kebijakan ekonomi berdasarkan asas di atas, termasuk asas keberlanjutan dan keseimbangan. Kemajuan ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peran SDGs dalam Ekonomi

Dalam artikel ini, fokus pembahasan mengenai hubungan Ekonomi Pancasila dengan SDGs berfokus pada ranah ekonomi, yakni sesuai dengan poin 7, 8, 9, 10, serta 17 seperti yang sudah terlihat pada 17 tujuan dari SDGs. Adapun isi dari point 7 yakni Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Adanya tujuan ini dicerminkan atau didasarkan pada masalah lapangan yang sebenarnya. Misalnya di Indonesia dan dunia, masih banyak daerah yang belum teraliri listrik, meskipun hal ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah memastikan akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Kemudian, sejumlah besar informasi terbarukan harus ditambahkan ke struktur energi global. Serta, menggandakan laju perbaikan energi. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan visi misi ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Yakni untuk menyejahterkan masyarakat secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang terikat. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau implementasi langsung, yaitu dengan memperkuat kerja sama internasional, perihal fasilitas akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, yang didalamnya termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan lebih bersih, serta mendorong infrastruktur dan energi Investasi bersih dalam teknologi energi. Tak lupa juga menyediakan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara berkembang.

Kemudian, poin 8 melibatkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan menyediakan tenaga kerja yang komprehensif dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Memiliki pekerjaan tidak menjamin Anda keluar dari kemiskinan. Bidang kreatifnya adalah merumuskan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, yang akan mengarah pada pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang lebih baik dan lebih inklusif. Atas dasar ini, langkah-langkah yang akan diambil termasuk memperluas bantuan teknis terkait perdagangan ke negara-negara berkembang. Kemudian kembangkan dan terapkan kerangka kerja yang komprehensif. Kemudian tingkatkan bantuan ke negara berkembang dan negara terbelakang. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mencapai pekerjaan yang layak dan telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masalah ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan dimasukkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinasi pelaksanaan SDG lintas departemen dan memasukkan SDG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Sedangkan pada saat yang sama, poin 9 membahas tentang membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi merupakan kekuatan pendorong penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saat ini,



lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Oleh karena itu, pertumbuhan transportasi massal dan energi terbarukan serta perkembangan industri dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Kemajuan teknologi juga dapat memecahkan tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti memberikan kesempatan kerja baru dan meningkatkan efisiensi energi. Atas dasar ini, maka langkah yang harus diambil adalah mendorong pembangunan berkelanjutan negara berkembang dengan memberikan dukungan keuangan, teknis dan teknologi kepada negara-negara tertinggal. Dan untuk mendukung teknologi dalam negeri, penelitian dan inovasi di negara berkembang, termasuk memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk diversifikasi industri dan nilai tambah barang.

Kemudian, pada poin ke-10 adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara dengan memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi pendapatan atau ketimpangan hasil, termasuk menghapus diskriminasi terhadap hukum. Dan melalui implementasi kebijakan dan praktek serta mendorong adanya peraturan perundang-undangan, kebijakan dan tindakan yang sesuai untuk pelaksanaannya.

Terakhir pada poin 17, perkuat langkah implementasi dan revitalisasi kemitraan global untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti keuangan, teknologi, perdagangan, koherensi kebijakan dan kelembagaan, serta data, pemantauan dan akuntabilitas. Dari perspektif keuangan, Indonesia dapat fokus membantu negara-negara berkembang mencapai pengelolaan hutang jangka panjang yang berkelanjutan melalui kebijakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan hutang, keringanan hutang dan restrukturisasi hutang sebagaimana mestinya, dan penyelesaian hutang negara-negara miskin yang berhutang banyak.

KESIMPULAN

Sustainable Development Goals atau Sustainable Development Goals (SDG) adalah agenda internasional, kelanjutan dari Millennium Development Goals atau Millennium Development Goals (MDG), tetapi dengan visi umum yang lebih luas. 17 tujuan tersebut merangkum 169 tujuan, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ketertinggalan semua negara maju dan berkembang di dunia. Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan ekonomi Pancasila dan saling mendukung. Sistem ekonomi Pancasila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem ekonomi tersebut tidak lepas dari asas keadilan dan kemakmuran atau kekeluargaan. Tentunya dalam sistem perekonomian tidak lepas dari adanya rencana atau agenda pembangunan. Secara filosofis tujuan pembangunan nasional Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan negara mencerminkan pendekatan Pancasila, yaitu upaya memajukan pembangunan dan hasil yang dicapai untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ini terkait dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perekonomian nasional merupakan salah satu aspek sosial dan lingkungan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara sistem ekonomi Pancasila dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dan saling mendukung. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bentuk kontrak sosial, berfungsi dan berfungsi dengan sempurna (di luar ekspektasi). Keduanya adalah ideologi yang mengarah pada landasan kebijakan dan menjadi pedoman hidup masyarakat dan negara yang mewujudkan kehidupan bernegara. Tujuan Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah untuk mempertahankan kehidupan sosial dan memperjuangkan kemanusiaan, peradaban dan keadilan. Kemudian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah nilai-nilai global yang terwujud dalam akar nilai-nilai lokal seperti Pancasila. Melalui hubungan di atas,



terlihat jelas bahwa ekonomi Pancasila terkait dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena ekonomi Indonesia yang menganut ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sesuai dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Sebaiknya peran pemerintah lebih mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada ataupun membuat inovasi kebijakan yang baru sesuai dengan visi misi ekonomi pancasila dan selaras dengan SDGs 2030. Khususnya dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Tak lupa peran dari masyarakat juga dibutuhkan, dimana masyarakat berani keluar dari zona nyaman, dan dapat mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga nantinya akan menjadi sistem yang selaras dan juga tepat pada sasaran. Selain itu, di era sekarang ini, dan juga sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan, pemerintah juga dianjurkan mengembangkan SDGs Desa. Yaitu dengan cara melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan. Dimana dengan adanya dan berkembangnya SDGs Desa tersebut, dapat lebih mudah untuk mengontrol kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, dengan adanya SDGs Desa juga dapat memastikan keadilan dan kesejahteraan secara merata dan menyeluruh. Adapun dalam pelaksanaannya dapat mengandalkan BUMDes serta mitra-mitra terkait, tentunya dengan pengawasan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Kesejahteraan Sosial: Journal of Social Welfare*, 1(1), 39–52.
- Alisjahbana, A. S., Yusuf, A. A., Anna, Z., Hadisoemarto, P. F., Kadarisman, A., Maulana, N., ... Megananda. (2018). *Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Limbong, B. (2011). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mohieldin, M., & Vasquez, E. I. (2017). The Localization of the Sustainable Development Goals: Implementing the SDGs in Colombia, Indonesia, and Kenya. Retrieved March 16, 2021, from Sustainable Cities website: <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/localization-sustainable-development-goals-implementing-sdgs-colombia-indonesia-and-kenya>
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Peraturan Presiden Nomor 59. , www.sdg2030indonesia.org § (2017).
- Rahman, A. B. (2012). Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang Dan Tantangan*. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4809/>
- Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a Literature Review. *MCN The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 27(6), 31–38.
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). *Sustainable Development Report 2019*. New York.
- Saltikov, B., & Josette. (2012). *How To Do a Systematic Literature Review in Nursing: A Step-by-Step Guide*. United Kingdom: McGraw Hill Education.